



Strategi Pengembangan Zona Integritas Dalam Mempertahankan Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Studi Kasus Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar)

Sisilia Ni Wayan Dina Natasya Adelia^{*a}, Ni Putu Anik Prabawati^a

^a Universitas Udayana

*Correspondence: natasyaadelia073@student.unud.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the strategies of Class I Immigration Office TPI Denpasar in establishing Integrity Zones and the supporting factors in maintaining the Clean Corruption-Free Zone (WBK) and Clean and Serviceable Bureaucracy Area (WBBM) designations. The research method employed is qualitative with a case study approach. Data were collected through interviews with key informants and document analysis. The findings reveal that leadership and staff commitment, effective monitoring and evaluation systems, and support from various stakeholders are critical factors contributing to the success of Class I Immigration Office TPI Denpasar in establishing and sustaining Integrity Zones. This study contributes significantly to understanding the implementation of bureaucratic reforms in Indonesia, particularly in the context of public service delivery in government agencies.

Keywords: Integrity Zones, Clean Corruption-Free Zone (WBK), Clean and Serviceable Bureaucracy Area (WBBM), Immigration Office, public service

Abstrak

Studi ini bertujuan pada rangka menganalisis strategi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar pada mengembangkan Zona Integritas serta faktor-faktor yang mendukung pada mempertahankan gelar Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Metode studi yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melewati wawancara dengan informan kunci serta analisis dokumen terkait. Hasil studi menunjukkan yakni komitmen pimpinan serta pegawai, sistem monitoring serta evaluasi yang efektif, serta dukungan dari sejumlah pemangku kepentingan menjadi faktor kunci pada keberhasilan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar pada mengembangkan serta mempertahankan Zona Integritas. Studi ini memberikan kontribusi penting pada memahami implementasi reformasi birokrasi di Indonesia, khususnya pada konteks pelayanan publik di instansi pemerintah.

Kata kunci: Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kantor Imigrasi, pelayanan publik

I. Pendahuluan

Korupsi bagaikan penyakit kronis yang menggerogoti sendi-sendi bangsa Indonesia. Praktik koruptif tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pengembangan nasional serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Berdasarkan survei dari Transparency International, Indonesia memperoleh skor indeks sudut pandang korupsi (IPK) sebesar 40 pada tahun 2020, dengan nilai maksimum 100 (Wihardiasty & Sujianto, 2022). Hingga kini, indeks sudut pandang korupsi dianggap sebagai metode yang valid pada rangka mengukur tingkat korupsi di sebuah negara.

Sejumlah upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan, mulai dari operasi tangkap tangan, penegakan hukum, hingga edukasi serta pencegahan. pada rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan, pemerintahan

mengimplementasikan reformasi birokrasi. Reformasi ini bertujuan pada rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, efektif, serta efisien, sehingga mampu melayani masyarakat dengan cepat, tepat, serta profesional. Proses reformasi ini melibatkan perbaikan ribuan prosedur yang tumpang tindih, jutaan pegawai, serta memerlukan anggaran yang signifikan. Reformasi ini juga mencakup penataan ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dengan langkah-langkah konkret serta inovatif (Hapsari et al., 2019).

Untuk mendukung reformasi ini, diterbitkan Peraturan Presiden No. 81 tahun 2010 berkenaan dengan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang bertujuan pada rangka meningkatkan kapasitas serta akuntabilitas organisasi, mewujudkan pemerintahan yang bebas dari KKN, serta meningkatkan pelayanan publik. Instansi pemerintahan memwujud satuan-satuan percontohan reformasi seperti zona integritas, konsep yang diadaptasi dari island of integrity yang digunakan pada rangka pemberantasan korupsi. Pelayanan birokrasi di Indonesia yang rawan korupsi menyebabkan masyarakat semakin toleran terhadap praktik pungli serta secara tidak langsung mendukung keberlanjutan KKN.

Konsep Zona Integritas, WBK, serta WBBM yaitu terobosan baru pada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Zona Integritas didefinisikan sebagai agenda yang diimplementasikan baik di tingkat daerah maupun nasional. Sedangkan WBK serta WBBM yaitu gelar yang diberikan pada instansi pemerintahan yang sudah menunaikan delapan komponen pengukuran WBK/WBBM. Tahapan pengembangan Zona Integritas menuju WBK serta WBBM mencakup penancangan pengembangan Zona Integritas serta proses pengembangan Zona Integritas menuju WBK serta WBBM.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar yaitu salah satu instansi pemerintahan yang berkomitmen pada rangka mengembangkan Zona Integritas serta mendapat gelar WBK/WBBM (Pranata, 2020). Hal ini didasari oleh peran penting Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar pada menjaga perlintasan orang keluar masuk wilayah Indonesia. Sebagai pintu gerbang negara, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar mempunyai tanggung jawab yang besar pada rangka mencegah praktik korupsi serta memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat (Asih & Dewi, 2023).

Oleh karena itu, studi ini bertujuan pada rangka menganalisis strategi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar dalam mengembangkan Zona Integritas serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar pada mempertahankan gelar WBK/WBBM.

II. Tinjauan Pustaka

Zona Integritas

Zona Integritas yaitu sebuah gelar yang diberikan pada satuan pekerjaan di lingkungan instansi pemerintahan yang menunjukkan komitmen pada rangka mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi serta birokrasi yang bersih serta melayani. Gelar ini yaitu bagian dari upaya pemerintahan pada rangka mereformasi birokrasi serta memperbaiki kualitas pelayanan publik. Agenda zona integritas bertujuan mempercepat pencapaian tujuan reformasi birokrasi, yaitu mewujudkan pemerintahan yang transparan serta akuntabel, efisien, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, sejumlah hambatan seringkali muncul pada upaya ini, seperti penyalahgunaan kekuasaan, praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN), serta lemahnya pengawasan (Wanisa & Salomo, 2023).

Wilayah Bebas dari Korupsi

Wilayah Bebas Korupsi menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 berkenaan dengan Pengembangan serta Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih serta Melayani yaitu penghargaan yang diberikan pada satuan pekerjaan yang berhasil menerapkan mayoritas dari enam bidang perubahan pada agenda reformasi birokrasi. Bidang-bidang tersebut mencakup manajemen perubahan, penataan prosedur operasional, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan

kualitas pelayanan publik. Selain itu, satuan pekerjaan perlu memperoleh hasil baik dari survei eksternal Indeks Sudut pandang Korupsi (IPK) serta Indeks Sudut pandang Kualitas Pelayanan, dengan nilai IPK minimal 13,5 dari 15, serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan oleh auditor internal serta eksternal.

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Wilayah Birokrasi Bersih serta Melayani (WBBM) menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 berkenaan dengan Pengembangan serta Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih serta Melayani yaitu gelar yang diberikan pada satuan pekerjaan yang sudah menunaikan mayoritas kriteria penilaian Sistem Manajemen Pengendalian Intern (SPIP), Penilaian Mandiri Penilaian Risiko (PMPR), Pengukuran Kinerja Pengendalian Intern (MKPI), serta Pengukuran Kinerja Satuan pekerjaan (PKUK), serta sudah mengembangkan budaya integritas serta menerapkan agenda pencegahan korupsi serta peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan satuan kerja. WBBM mensyaratkan nilai sudut pandang kualitas pelayanan publik minimal 16 dari total skor 20, serta penyelesaian tindak lanjut hasil audit oleh pemeriksa internal serta eksternal.

III. Metode Studi

Studi ini memakai pendekatan studi kualitatif dengan metode studi kasus pada rangka mendalami implementasi serta strategi pengembangan Zona Integritas di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Pendekatan ini memungkinkan peneliti pada rangka menggali pemahaman yang mendalam berkenaan dengan konteks spesifik serta kompleksitas dari fenomena yang diteliti.

Proses studi kualitatif dimulai dengan merumuskan pertanyaan studi yang relevan serta signifikan terkait dengan Zona Integritas. Data dikumpulkan melewati sumber-sumber seperti jurnal akademik, surat kabar elektronik, serta arsip-arsip yang relevan dengan topik tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti pada rangka mengumpulkan data yang kaya serta mendalam, yang mencakup sejumlah perspektif serta pengalaman dari sejumlah informan.

Langkah berikutnya pada studi ini yaitu menganalisis data secara induktif. Proses analisis dimulai dengan mengidentifikasi tema-tema khusus yang muncul dari data yang terkumpul, kemudian mengembangkan tema-tema ini menjadi tema-tema umum yang lebih luas. Analisis ini dilakukan pada rangka menemukan pola-pola, hubungan-hubungan, serta makna-makna yang terkait dengan pengembangan Zona Integritas di Kantor Imigrasi tersebut.

Pendekatan studi kasus pada studi ini melibatkan analisis mendalam terhadap data kualitatif pada rangka menggambarkan konteks spesifik dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Penulis juga merencanakan pada rangka melaksanakan wawancara dengan informan kunci seperti pimpinan satuan kerja, pegawai, serta pihak-pihak terkait lainnya. Wawancara ini bertujuan pada rangka memperoleh pemahaman yang lebih pada berkenaan dengan strategi, tantangan, serta dampak dari pengembangan Zona Integritas.

Hasil studi ini akan disajikan pada wujud narasi yang deskriptif serta interpretatif. Narasi ini akan menjelaskan secara rinci temuan-temuan studi, memberikan konteks yang diperlukan, serta menafsirkan makna dari data yang diperoleh. Pendekatan deskriptif serta interpretatif ini memungkinkan pada rangka menggambarkan secara holistik berkenaan dengan bagaimana Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar berhasil mengembangkan serta mempertahankan Zona Integritas pada konteks yang kompleks serta dinamis.

IV. Pembahasan

Strategi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar pada Mengembangkan Zona Integritas

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar sudah menunjukkan komitmennya pada mengembangkan Zona Integritas. Reformasi birokrasi yaitu langkah awal yang krusial pada mendukung agenda pemerintahan pada rangka menata sistem penyelenggaraan organisasi yang lebih baik, efektif, serta efisien di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar (Rompas et al., 2023). Namun, pada prosesnya, sejumlah kendala seperti penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN), diskriminasi, serta lemahnya pengawasan masih sering ditemui. pada rangka mengatasi perilaku menyimpang ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar sudah menerapkan langkah-langkah strategis melewati pengembangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih serta Melayani (WBBM).

Salah satu langkah pertama yang diambil yaitu penetapan satuan pekerjaan (Satker) yang diusulkan pada rangka mendapat gelar WBK/WBBM. Meski demikian, penerapan indikator-indikator yang diatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tidak selalu mudah. Kendala yang dihadapi antara lain yaitu ketidakrelevanan serta ketidaksinkronan indikator tersebut dengan tugas serta fungsi Kementerian Hukum serta HAM. Meskipun demikian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar berhasil mendapat gelar WBK pada tahun 2018 serta WBBM pada tanggal 21 Desember 2020. Selain itu, desk evaluasi oleh Tim Pemeriksa Internal Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum serta Hak Asasi Manusia sudah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2022. Dengan demikian, satuan pekerjaan layanan yang sudah mendapat gelar ZI WBK/WBBM bisa dipastikan mempunyai standarisasi layanan yang baik serta bebas dari praktik korupsi, serta berkomitmen pada rangka memberikan layanan yang memuaskan serta bersih dari korupsi.

Dalam upayanya pada rangka mempertahankan gelar WBK serta WBBM, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar sudah mengambil sejumlah langkah strategis. Menurut wawancara dengan Kepala Urusan Umum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, langkah konkret yang diambil yaitu dengan mengembangkan komitmen bersama yang disepakati serta dijalankan oleh seluruh stakeholder di instansi tersebut. Komitmen ini diikuti dengan persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas melewati pelatihan soft skills serta inovasi yang menjawab keluhan masyarakat. Fokus utama kantor ini yaitu pada kualitas layanan yang diberikan pada masyarakat, di mana umpan balik dari masyarakat melewati survei kepuasan sangat berpengaruh pada mempertahankan Zona Integritas.

Untuk mengembangkan budaya pekerjaan yang bersih serta melayani, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar memberikan sejumlah pelatihan soft skills pada pegawai, termasuk pelatihan bahasa isyarat serta bahasa Mandarin. Pelatihan-pelatihan ini bertujuan pada rangka meningkatkan kemampuan pegawai pada memberikan pelayanan yang maksimal pada masyarakat.

Tantangan utama yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar pada mempertahankan status WBK serta WBBM yaitu meminimalisir keluhan dari masyarakat. Kantor ini berfokus pada memberikan pelayanan yang maksimal serta selalu memperhatikan keluhan masyarakat. pada rangka mengatasi keluhan tersebut, kantor ini terus berinovasi pada layanan serta membuat konten kegiatan positif di media sosial.

Pengawasan oleh pusat tetap dilakukan secara berkala meskipun Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar sudah mendapat gelar WBK serta WBBM. Evaluasi dilakukan setiap dua tahun oleh tim Inspektorat Jenderal, serta monitoring tahunan oleh tim Tim Pemeriksa Internal (TPI) serta Badan Narkotika Nasional (BNN) pada rangka memastikan kualitas layanan serta kinerja pegawai tetap optimal. Dengan demikian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar terus berkomitmen pada rangka mempertahankan serta meningkatkan standar layanan yang sudah diraih demi memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat.

Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar pada Mempertahankan Gelar WBK/WBBM

Keberhasilan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar pada mempertahankan gelar WBK/WBBM tidak hanya didorong oleh komitmen kuat dari pimpinan serta seluruh pegawai, tetapi juga oleh implementasi sistem monitoring serta evaluasi yang efektif (Sirin, 2021). Pimpinan Kantor memainkan peran penting sebagai teladan pada menerapkan nilai-nilai integritas serta antikorupsi, yang menjadi fondasi utama pengembangan Zona Integritas. Mereka memastikan yakni integritas bukan sekadar slogan, melainkan sebuah prinsip yang dijunjung tinggi serta diterapkan pada setiap aspek operasional kantor.

Seluruh pegawai terlibat secara aktif pada agenda ini, menyadari yakni upaya mengembangkan Zona Integritas yaitu tanggung jawab bersama pada rangka mewujudkan lingkungan pekerjaan yang transparan serta bebas dari praktik korupsi. Sistem monitoring serta evaluasi yang diterapkan tidak hanya mencakup penetapan indikator kinerja yang jelas, tetapi juga pelaksanaan proses monitoring yang rutin serta evaluasi mendalam terhadap kemajuan yang dicapai. Hasil dari proses monitoring serta evaluasi ini tidak hanya digunakan pada rangka memantau kemajuan, tetapi juga sebagai dasar pada rangka mengidentifikasi area-area perbaikan serta penyempurnaan pada implementasi Zona Integritas (Harefa et al., 2023). Langkah-langkah perbaikan yang diambil kemudian menjadi bagian integral dari upaya berkelanjutan pada rangka mempertahankan serta meningkatkan standar integritas kantor.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar sudah berhasil mengembangkan budaya pekerjaan yang berintegritas serta antikorupsi melewati sejumlah langkah strategis. Penurunan angka pelanggaran disiplin serta kode etik pegawai menjadi indikasi jelas dari komitmen pada rangka menegakkan integritas di semua tingkatan. Hal ini mewujudkan lingkungan pekerjaan yang tidak hanya profesional tetapi juga mengedepankan nilai-nilai etika pada setiap interaksi dengan masyarakat (Sahadi et al., 2021). Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan juga menjadi bukti nyata dari efektivitas budaya pekerjaan yang berintegritas. Pelayanan yang lebih transparan, responsif, serta akuntabel tidak hanya meningkatkan citra Kantor Imigrasi di mata publik tetapi juga mengembangkan kepercayaan yang lebih kuat.

Selain itu, peningkatan pada akuntabilitas serta transparansi pada pengelolaan keuangan serta kinerja menjadi hasil dari upaya berkelanjutan pada rangka memperbaiki sistem serta prosedur internal (Khikmah & Purwanto, 2023). Langkah-langkah ini mencakup implementasi kontrol yang ketat serta pelaporan yang terbuka, sehingga meminimalkan risiko korupsi serta meningkatkan efisiensi operasional.

Dukungan dari sejumlah pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, juga berperan krusial pada kesuksesan ini. Tidak kalah pentingnya, dukungan serta masukan dari masyarakat menjadi pendorong utama pada menjaga kualitas pelayanan serta memperkuat komitmen terhadap integritas. Partisipasi aktif masyarakat pada memberikan masukan juga berperan pada memperbaiki serta mengembangkan layanan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan publik.

V. Penutup

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar sudah menunjukkan komitmennya yang kuat pada mengembangkan Zona Integritas sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi di lingkungan pelayanan publik. Melewati gelar Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih serta Melayani (WBBM), kantor ini tidak hanya berhasil menunaikan standar kualitas layanan yang tinggi, tetapi juga menetapkan teladan pada praktek manajemen yang transparan serta akuntabel. Langkah-langkah strategis yang diambil, seperti pembinaan SDM yang berintegritas, pelatihan soft skills, serta implementasi inovatif pada pelayanan pada masyarakat, sudah membantu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar pada mempertahankan prestasinya.

Dengan dukungan dari sejumlah pemangku kepentingan serta sistem monitoring serta evaluasi yang efektif, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar terus berkomitmen pada rangka meningkatkan standar layanan serta

memastikan keberlanjutan Zona Integritas. Tantangan yang dihadapi tidak melulu berkenaan dengan meminimalisir keluhan masyarakat, tetapi juga berkenaan dengan menjaga budaya pekerjaan yang bersih serta pelayanan yang berkualitas. Dengan demikian, kantor ini tidak hanya berperan sebagai penjaga perlintasan negara, tetapi juga sebagai agen perubahan pada mengembangkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik bagi Indonesia.

Daftar Pustaka

- Asih, G. D. K., & Dewi, P. R. K. (2023). Peran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar pada Pemberian Perlindungan Status serta Pemenuhan Hak Anak Dwi Kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 6(2). <https://10.0.205.137/jikk.v6i2.470>
- Hapsari, J., Purnaweni, H., & Priyadi, B. P. (2019). Implementasi Pengembangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih serta Melayani Di BBWS Pemali Juana Semarang. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 25.
- Harefa, K. Y., Waruwu, S., Lase, H., & Telaumbanua, E. (2023). Implementasi Sistem Monitoring serta Evaluasi pada Meningkatkan Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2054-2061.
- Khikmah, L., & Purwanto, A. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas serta Fairness Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Terhadap Pencegahan Korupsi Pemerintahan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Daerah di Pulau Jawa). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(1), 1-13. Retrieved from <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Pranata, I. K. A. (2020). Penggunaan Teknologi Informasi Di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar). *Thematics | Technology Management and Informatics Research Journals*, 3(1), 89.
- Rompas, D. J. M., Pioh, N. R., & Monintja, D. K. (2023). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik pada Mencapai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Wbk/Wbbm) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu. *Jurnal Agenda Studi Ilmu Pemerintahan / Articles*, 3(1).
- Sahadi, & Taufiq, O. H. (2021). Peranan Etika pada Lingkungan Kerja. *Jurnal MODERAT*, 7(2), 225.
- Sirin, A. (2021). Strategi Implementasi Pengembangan Zona Integritas Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. *Edutrained: Jurnal Pendidikan serta Pelatihan*, 5(2), 148.
- Wanisa, Z., & Salomo, R. V. (2023). Evaluasi Satu Dekade Pengembangan Zona Integritas di Instansi Pemerintahan Pusat Indonesia. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 11(1), 1-18.
- Wihardiasty, S., & Sujianto, S. (2022). Pelaksanaan Pengembangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1).